



Gerakan Menuju
Kota Cerdas
**(Smart City)
2024**

**LAPORAN HASIL EVALUASI TAHAP II
IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY)
TAHUN 2024
KAB. BADUNG**

Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Smart City Tahap II Tahun 2024
untuk 191 Kabupaten/Kota

Jakarta, 25 November 2024

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 Tanggal 6 September 2024 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

1. Dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode 2017-2022 terdapat seratus enam puluh lima (165) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* melalui tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 29 Oktober – 20 November 2024. Sedangkan terdapat dua puluh enam (26) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* dan tidak menghadiri kegiatan evaluasi dimaksud (daftar terlampir);
2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) pada tujuh puluh lima kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2022 dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
 - a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen *masterplan* kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, keamanan informasi serta anggaran untuk program *smart city*;

- c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan.
Penghitungan dampak (*impact*) dilakukan menggunakan metode survei dilakukan terhadap lima puluh (50) responden untuk setiap program dari enam (6) dimensi *smart city* (*smart governance, smart economy, smart living, smart society, smart environment, dan smart branding*); 50 orang x 6 dimensi = 300 orang responden, yakni masyarakat yang sudah menggunakan layanan/program, dan merasakan dampak layanan/program dimaksud
 - d. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah; dan
 - e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi pada program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pemerintah kota/kabupaten.
3. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) yang berada pada enam puluh enam (66) kota/kabupaten pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru, berdasarkan enam (6) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni: *Baseline* (bobot 10%), *Output* (bobot 20%), *Impact* (bobot 20%), *Outcome* (bobot 20%), Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), dan penilaian program kolaborasi (bobot 10%). Adapun program kolaborasi, mencakup jumlah program inovasi yang dilakukan secara mandiri oleh kota/kabupaten, dan atau berkolaborasi dengan kota/kabupaten lainnya pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru
 4. Hasil penilaian dari berbagai dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:
 - a. Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline, Output, Outcome, Impact, dan Quick Win*.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

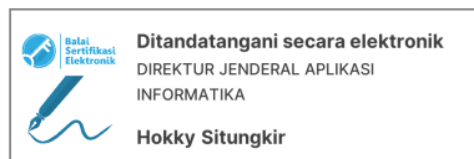
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata Baseline, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.
5. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Hokky Situngkir

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran I

Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024

Tanggal : 25 November 2024

Kepada Yth.

1	Bupati Badung	101	Bupati Semarang
2	Bupati Bandung	102	Bupati Siak
3	Bupati Banggai	103	Bupati Sidoarjo
4	Bupati Bangka Selatan	104	Bupati Simalungun
5	Bupati Banjar	105	Bupati Situbondo
6	Bupati Bantul	106	Bupati Sleman
7	Bupati Banyuasin	107	Bupati Solok
8	Bupati Banyumas	108	Bupati Sragen
9	Bupati Banyuwangi	109	Bupati Subang
10	Bupati Batang	110	Bupati Sukabumi
11	Bupati Bekasi	111	Bupati Sukoharjo
12	Bupati Belitung	112	Bupati Sumbawa
13	Bupati Belitung Timur	113	Bupati Sumbawa Barat
14	Bupati Bengkulu Utara	114	Bupati Sumedang
15	Bupati Blitar	115	Bupati Sumenep
16	Bupati Blora	116	Bupati Tabalong
17	Bupati Bogor	117	Bupati Tabanan
18	Bupati Bojonegoro	118	Bupati Tangerang
19	Bupati Boyolali	119	Bupati Tapanuli Selatan
20	Bupati Brebes	120	Bupati Tapanuli Utara
21	Bupati Buton	121	Bupati Temanggung
22	Bupati Cirebon	122	Bupati Toba
23	Bupati Dairi	123	Bupati Trenggalek
24	Bupati Deli Serdang	124	Bupati Tuban
25	Bupati Demak	125	Bupati Wakatobi
26	Bupati Gresik	126	Bupati Wonogiri
27	Bupati Grobogan	127	Bupati Wonosobo
28	Bupati Gunungkidul	128	Walikota Ambon
29	Bupati Halmahera Selatan	129	Walikota Balikpapan
30	Bupati Halmahera Tengah	130	Walikota Banda Aceh
31	Bupati Halmahera Timur	131	Walikota Bandar Lampung

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

32	Bupati Halmahera Utara	132	Walikota Bandung
33	Bupati Humbang Hasundutan	133	Walikota Banjarbaru
34	Bupati Indramayu	134	Walikota Banjarmasin
35	Bupati Jember	135	Walikota Batam
36	Bupati Jembrana	136	Walikota Batu
37	Bupati Jepara	137	Walikota Bau-Bau
38	Bupati Jombang	138	Walikota Bekasi
39	Bupati Karanganyar	139	Walikota Binjai
40	Bupati Karawang	140	Walikota Bitung
41	Bupati Karo	141	Walikota Bogor
42	Bupati Katingan	142	Walikota Bontang
43	Bupati Kebumen	143	Walikota Bukittinggi
44	Bupati Kendal	144	Walikota Cilegon
45	Bupati Klaten	145	Walikota Cimahi
46	Bupati Klungkung	146	Walikota Cirebon
47	Bupati Konawe Selatan	147	Walikota Denpasar
48	Bupati Kotawaringin Timur	148	Walikota Depok
49	Bupati Kudus	149	Walikota Dumai
50	Bupati Kulonprogo	150	Walikota Jambi
51	Bupati Kuningan	151	Walikota Jayapura
52	Bupati Kutai Barat	152	Walikota Kediri
53	Bupati Kutai Kartanegara	153	Walikota Kupang
54	Bupati Kutai Timur	154	Walikota Madiun
55	Bupati Lamongan	155	Walikota Magelang
56	Bupati Langkat	156	Walikota Makassar
57	Bupati Lima Puluh Kota	157	Walikota Malang
58	Bupati Lombok Barat	158	Walikota Manado
59	Bupati Lombok Tengah	159	Walikota Mataram
60	Bupati Lombok Timur	160	Walikota Medan
61	Bupati Lombok Utara	161	Walikota Mojokerto
62	Bupati Luwu Timur	162	Walikota Padang
63	Bupati Luwu Utara	163	Walikota Padang Panjang
64	Bupati Magelang	164	Walikota Palembang
65	Bupati Magetan	165	Walikota Palopo
66	Bupati Majalengka	166	Walikota Pangkal Pinang
67	Bupati Malang	167	Walikota Pariaman
68	Bupati Manggarai	168	Walikota Pasuruan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

69	Bupati Manggarai Barat	169	Walikota Payakumbuh
70	Bupati Manggarai Timur	170	Walikota Pekalongan
71	Bupati Maros	171	Walikota Pekanbaru
72	Bupati Mimika	172	Walikota Pontianak
73	Bupati Minahasa	173	Walikota Probolinggo
74	Bupati Minahasa Utara	174	Walikota Samarinda
75	Bupati Mojokerto	175	Walikota Semarang
76	Bupati Morowali	176	Walikota Serang
77	Bupati Muara Enim	177	Walikota Sibolga
78	Bupati Musi Banyuasin	178	Walikota Singkawang
79	Bupati Musi Rawas	179	Walikota Sukabumi
80	Bupati Ngada	180	Walikota Surabaya
81	Bupati Nganjuk	181	Walikota Surakarta
82	Bupati Ngawi	182	Walikota Tangerang
83	Bupati Ogan Komering Ilir	183	Walikota Tangerang Selatan
84	Bupati Pacitan	184	Walikota Tanjung Balai
85	Bupati Padang Pariaman	185	Walikota Tanjungpinang
86	Bupati Pakpak Bharat	186	Walikota Tasikmalaya
87	Bupati Paser	187	Walikota Tebing Tinggi
88	Bupati Pasuruan	188	Walikota Tegal
89	Bupati Pati	189	Walikota Ternate
90	Bupati Pelalawan	190	Walikota Tomohon
91	Bupati Pematang	191	Walikota Yogyakarta
92	Bupati Penajam Paser Utara		
93	Bupati Ponorogo		
94	Bupati Probolinggo		
95	Bupati Pulau Morotai		
96	Bupati Purwakarta		
97	Bupati Purworejo		
98	Bupati Raja Ampat		
99	Bupati Rembang		
100	Bupati Samosir		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE

**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHAP II TAHUN 2024
 PADA 191 KOTA/KABUPATEN
 PROGRAM GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) PERIODE TAHUN 2017-2022**

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
1	KAB. BADUNG	3,56	2,73	3,27	3,18	2,8		3,08	0,11	REGULER
2	KAB. BANDUNG	2,72	2,69	3,24	2,85	3,28		3,01	0	REGULER
3	KAB. BANGGAI	3,76	2,49	3,3	2,97	3,05		3,07	-0,07	REGULER
4	KAB. BANGKA SELATAN	2,24	2,29	2,01	1,52	1,88		1,97	-0,29	REGULER
5	KAB. BANJAR	2,72	2,02	2,65	2,44	2,17		2,39	-0,03	REGULER
6	KAB. BANTUL	3,96	3,64	3,78	3,26	3,97	3,97	3,72	0,16	KPPN IKN
7	KAB. BANYUASIN	3,8	3,25	3,08	3,44	3,35		3,31	0,44	REGULER
8	KAB. BANYUMAS	3,68	3,64	3,41	3,04	3,78		3,48	0,06	REGULER
9	KAB. BANYUWANGI	4	3,78	3,75	3,79	2,97		3,63	0,33	REGULER
10	KAB. BATANG	3,84	3,35	3,59	3,6	3,67		3,59	0,19	REGULER
11	KAB. BEKASI	3,6	3,05	3,3	3,04	3,33		3,23	0,42	REGULER
12	KAB. BELITUNG	3,52	2,96	2,87	3,19	2,87	1,67	2,9	0,06	KPPN IKN
13	KAB. BELITUNG TIMUR	2,28	2,2	2,34	2,13	1,53	2,17	2,09	0,63	KPPN IKN
14	KAB. BENGKULU UTARA	2,76	2,2	2,76	2,69	2,52		2,59	0,8	REGULER
15	KAB. BLITAR	3,52	3,2	3,26	3	3,1		3,19	-0,1	REGULER
16	KAB. BLORA	2,6	1,76	2,39	2,9	1,28		2,17	0,02	REGULER
17	KAB. BOGOR	3,96	3,15	3,22	3,04	2,85		3,17	0,07	REGULER
18	KAB. BOJONEGORO	3,32	3,15	3,45	3,11	3,77		3,37	0,3	REGULER
19	KAB. BOYOLALI	3,76	3,49	3,61	3,82	3,53	3,53	3,62	0,32	KPPN IKN
20	KAB. BREBES	1,72	1,98	2,48	2,49	1,58		2,13	0,49	REGULER
21	KAB. CIREBON	2,96	2,76	3,19	2,98	2,55		2,91	-0,04	REGULER
22	KAB. DELI SERDANG	3,64	2,98	3,32	3,35	3,78		3,38	0,15	REGULER
23	KAB. DEMAK	4	3,8	3,65	3,73	3,92	3,8	3,8	0,17	KPPN IKN
24	KAB. GRESIK	3,88	3,04	3,38	3,27	3,55		3,37	0,24	REGULER
25	KAB. GROBOGAN	3,8	3,33	3,13	3,63	3,87		3,49	0,32	REGULER
26	KAB. GUNUNGKIDUL	3,96	3,76	3,52	4	3,9	3,8	3,81	0,15	KPPN IKN
27	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	2,16	1,8	1,97	2,85	1,58	-	1,86	-0,27	KPPN IKN
28	KAB. INDRAMAYU	3,36	2,8	3,15	2,8	3,05		3,01	0,24	REGULER
29	KAB. JEMBER	3,6	2,84	2,88	2,84	3,17		2,99	0,3	REGULER
30	KAB. JEMBRANA	3,36	2,76	3,28	2,8	2,32		2,9	0,18	REGULER
31	KAB. JEPARA	3,6	2,82	2,88	2,9	2,48	1,1	2,69	-0,51	KPPN IKN
32	KAB. JOMBANG	3,8	2,84	2,85	3,24	2,87		3,03	-0,37	REGULER
33	KAB. KARANGANYAR	2,92	2,62	2,93	3,03	2,55	1,53	2,67	0,21	KPPN IKN
34	KAB. KARAWANG	2,8	2,89	2,79	2,03	3,45		2,79	0,21	REGULER
35	KAB. KARO	2,8	2,24	2,72	2,8	2,12	-	2,26	0,1	KPPN IKN
36	KAB. KATINGAN	3,2	3	2,78	2,96	2,88		2,92	0,17	REGULER
37	KAB. KEBUMEN	3,8	3,09	3,59	3,34	2,97		3,34	-0,03	REGULER
38	KAB. KENDAL	3,96	3,44	3,58	3,44	3,82	2,93	3,55	0,1	KPPN IKN
39	KAB. KLATEN	3,8	3,35	3,18	3,27	2,83	1,87	3,09	-0,08	KPPN IKN
40	KAB. KLUNGKUNG	3,52	2,49	3,09	3,07	2,95		2,98	0,44	REGULER
41	KAB. KONawe SELATAN	3,64	2,69	2,96	2,33	2,55	3,2	2,79	0,47	KPPN IKN
42	KAB. KUDUS	3,68	3,25	3,61	3,23	3,57	3,2	3,42	0,11	KPPN IKN
43	KAB. KULON PROGO	3,68	3,16	3,22	3,27	3,35	3,73	3,34	0,02	KPPN IKN
44	KAB. KUNINGAN	2,52	2,44	2,7	2,65	3,28		2,74	0,24	REGULER
45	KAB. KUTAI BARAT	1,72	2,05	2,46	2,47	1,95	1,7	2,13	0,9	KPPN IKN
46	KAB. KUTAI KARTANEGARA	2,2	2,42	2,85	1,37	2,63	1,7	2,24	-0,58	KPPN IKN
47	KAB. KUTAI TIMUR	2,64	2,65	2,27	3,14	2,45		2,59	-0,37	REGULER
48	KAB. LAMONGAN	3,16	2,62	2,92	3,14	2,77		2,9	0,62	REGULER
49	KAB. LANGKAT	3,24	2,6	2,92	2,89	3,35		2,97	-0,03	REGULER
50	KAB. LIMA PULUH KOTA	2,56	2,38	2,55	3,01	2,52		2,6	1,05	REGULER
51	KAB. LOMBOK BARAT	3,84	3,64	3,5	3,34	3,85	2,77	3,53	0,61	KPPN IKN
52	KAB. LOMBOK TIMUR	3,08	1,85	2,33	2,51	2,13	1	2,17	0,31	KPPN IKN
53	KAB. LOMBOK UTARA	3,84	3,22	3,11	3,06	3,13	-	2,89	0,19	KPPN IKN
54	KAB. MAGELANG	3,76	3,51	3,51	3,07	3,08	3,77	3,39	0,58	KPPN IKN
55	KAB. MAGETAN	3,88	2,76	3,44	2,74	2,63		3,05	-0,2	REGULER
56	KAB. MAJALENGKA	2,28	2,49	2,95	1,4	1,48		2,19	-0,19	REGULER
57	KAB. MALANG	3,56	2,89	3,35	3,07	3	2,43	3,06	0,12	KPPN IKN
58	KAB. MANGGARAI	3,56	2,36	2,65	2,49	2,7	1,83	2,58	-0,09	KPPN IKN
59	KAB. MANGGARAI BARAT	2,44	2,45	2,92	3,16	2,62	2,04	2,68	0,01	KPPN IKN
60	KAB. MANGGARAI TIMUR	2,08	1,56	2,15	2,46	1,38	-	1,72	-0,49	KPPN IKN
61	KAB. MIMIKA	1,92	1,58	2,07	2,4	1,47		1,9	-0,57	REGULER
62	KAB. MINAHASA UTARA	1,2	1,15	1,83	1,22	1,28	1	1,32	-0,42	KPPN IKN
63	KAB. MOJOKERTO	3,88	3,51	3,34	3,28	2,73		3,29	-0,04	REGULER
64	KAB. MUARA ENIM	1,84	2,89	2,33	2,69	2,22		2,44	-0,24	REGULER
65	KAB. MUSI RAWAS	2,24	1,6	2,59	2,03	1,58		2,04	-0,01	REGULER

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
66	KAB. NGANJUK	3,24	3	3,47	3,4	3,6		3,37	-0,01	REGULER
67	KAB. NGAWI	3,92	3,04	3,56	3,33	3,1		3,35	0,26	REGULER
68	KAB. PADANG PARIAMAN	3,76	2,89	3	3,11	3,43		3,16	-0,04	REGULER
69	KAB. PAKPAK BHARAT	3,48	2,25	2,78	3,14	2,48	1,1	2,59	0,33	KPPN IKN
70	KAB. PASER	3,84	3,18	3	3,03	2,8	2,53	3,04	0,2	KPPN IKN
71	KAB. PATI	3,2	2,55	2,9	3,22	2,47		2,84	0	REGULER
72	KAB. PELALAWAN	1,72	1,8	2,15	1,39	1,2		1,7	-0,33	REGULER
73	KAB. PEMALANG	2,4	1,89	2,67	3,1	1,78		2,4	-0,06	REGULER
74	KAB. PENAJAM PASER UTARA	2,44	2	2,61	2,96	2,07		2,43	0,79	REGULER
75	KAB. PONOROGO	2	1,6	1,66	1,21	1,6		1,58	-0,95	REGULER
76	KAB. PROBOLINGGO	3,28	3,02	3,2	3,19	2,12	2,35	2,87	0,41	KPPN IKN
77	KAB. PULAU MOROTAI	2,64	1,65	2,4	3,19	2,45	1,37	2,34	0,07	KPPN IKN
78	KAB. PURWAKARTA	3,48	2,69	3,12	3,4	2,77		3,06	0,1	REGULER
79	KAB. PURWOREJO	2,52	2,53	2,93	3,04	2,42	2,17	2,65	0,4	KPPN IKN
80	KAB. REMBANG	2,8	2,24	2,67	3,04	2,17		2,57	0,23	REGULER
81	KAB. SEMARANG	2,92	2,47	2,62	2,76	2,85	2,03	2,64	0,13	KPPN IKN
82	KAB. SIAK	2,72	2,35	2,78	2,83	3,58		2,86	0,05	REGULER
83	KAB. SIDOARJO	3,28	3,15	3,55	3,48	3,23		3,37	0,36	REGULER
84	KAB. SIMALUNGUN	2,08	1,71	2,15	2,19	1,43	1	1,8	0,32	KPPN IKN
85	KAB. SITUBONDO	3,64	2,76	2,85	3,3	3,48		3,13	0,06	REGULER
86	KAB. SLEMAN	2,92	2,98	3,12	3,24	2,8	2,67	2,99	-0,05	KPPN IKN
87	KAB. SRAGEN	3,96	3,49	3,33	3,47	3,45	3,67	3,51	0,14	KPPN IKN
88	KAB. SUBANG	2,76	2,93	2,95	2,55	2,83		2,82	0,14	REGULER
89	KAB. SUKABUMI	2,88	2,55	2,73	1	2,7		2,36	0,51	REGULER
90	KAB. SUKOHARJO	3,92	3,42	3,59	3,74	3,83	3,83	3,69	0,24	KPPN IKN
91	KAB. SUMBAWA	3,56	1,64	2,87	2,7	2,8		2,65	-0,3	REGULER
92	KAB. SUMBAWA BARAT	2,72	2,64	3	3,53	2,75		2,96	0,2	REGULER
93	KAB. SUMENEP	2,24	2,31	3,2	2,75	2		2,6	-0,44	REGULER
94	KAB. TABALONG	3,8	3,55	3,45	3,78	3,33		3,55	0,17	REGULER
95	KAB. TABANAN	3,88	2,96	3,19	3,14	2,93		3,15	0,76	REGULER
96	KAB. TANGERANG	3,8	3,38	3,36	3,11	3,35		3,36	0,01	REGULER
97	KAB. TAPANULI SELATAN	2,08	1,8	2,41	1,95	2,02		2,09	0,19	REGULER
98	KAB. TAPANULI UTARA	2,6	1,58	2,41	2,99	2,15	1	2,19	-0,14	KPPN IKN
99	KAB. TEMANGGUNG	3,92	3,64	3,5	3,91	3,72	3,5	3,7	0,53	KPPN IKN
100	KAB. TOBA	2,96	2,36	2,68	2,96	2,08		2,31	0,14	KPPN IKN
101	KAB. TRENGGALEK	3,92	3,31	3,7	3,23	3,82		3,57	0,15	REGULER
102	KAB. TUBAN	3,8	2,82	3,29	3,77	3,18		3,32	0,59	REGULER
103	KAB. WAKATOBİ	1	1	1,18	1	1		0,94	-0,67	KPPN IKN
104	KAB. WONOGIRI	3,96	3,24	3,56	3,44	3,93	3,9	3,62	0,1	KPPN IKN
105	KAB. WONOSOBO	3,36	2,71	3,09	3,1	2,85	1,6	2,85	0,08	KPPN IKN
106	KOTA AMBON	3,8	2,8	2,99	3,3	3,03		3,1	0,23	REGULER
107	KOTA BALIKPAPAN	3,6	3,64	3,21	3,16	3,67	4	3,5	0,09	KPPN IKN
108	KOTA BANDA ACEH	3,36	3,02	3,18	2,89	2,67		3,01	0,61	REGULER
109	KOTA BANDAR LAMPUNG	2,16	1,93	2,5	2,71	2,15		2,32	-0,14	REGULER
110	KOTA BANDUNG	3,92	3,8	3,94	4	3,97		3,93	0,1	REGULER
111	KOTA BANJARBARU	1,92	2,11	2,28	1,2	2,22		1,98	-0,25	REGULER
112	KOTA BANJARMASIN	3,8	3,58	3,5	3,3	3,8		3,57	0,26	REGULER
113	KOTA BATAM	3,88	3,2	3,23	3,04	3,55		3,32	0,97	REGULER
114	KOTA BATU	3,24	2,55	3,04	2,98	2,02	3	2,74	0,47	KPPN IKN
115	KOTA BEKASI	4	3,45	3,56	3,57	3,65		3,6	0,39	REGULER
116	KOTA BINJAI	3	2,51	3,32	2,4	1,93		2,66	0,11	REGULER
117	KOTA BITUNG	3,36	2,98	2,82	2,76	2,52		2,83	-0,07	REGULER
118	KOTA BOGOR	3,76	3,47	3,35	3,49	3,97		3,57	0,22	REGULER
119	KOTA BUKITINGGI	2,28	2,22	2,06	1,01	2,12		1,92	-0,03	REGULER
120	KOTA CILEGON	1,72	2,18	2,36	2,71	1,73		2,2	-0,11	REGULER
121	KOTA CIMAHİ	3,88	3,24	3,53	3,79	3,88		3,63	0,12	REGULER
122	KOTA CIREBON	4	3,05	3,31	3,23	3,32		3,31	0,36	REGULER
123	KOTA DENPASAR	2,84	2,65	3,53	3,77	3,63		3,35	-0,08	REGULER
124	KOTA DEPOK	3,92	3,31	3,49	3,01	3,73		3,45	0,04	REGULER
125	KOTA DUMAI	3,8	2,76	2,99	3,11	3,82		3,22	0,29	REGULER
126	KOTA JAMBI	3,84	3,18	3,53	3,63	3,35		3,48	0	REGULER
127	KOTA JAYAPURA	1,64	1,49	1,78	2,64	1,63		1,85	0,22	REGULER
128	KOTA KEDIRI	4	3,2	3,27	3,34	3,47		3,38	0,18	REGULER
129	KOTA KUPANG	2,4	2,11	2,73	2,82	1,87		2,42	-0,11	REGULER
130	KOTA MADIUN	4	3,51	3,78	3,97	3,87		3,8	0,09	REGULER
131	KOTA MAGELANG	3,72	3,16	3,41	3,29	3,33	3,1	3,32	0,69	KPPN IKN
132	KOTA MAKASSAR	3,72	3,31	3,67	3,59	3,95		3,64	0,5	REGULER
133	KOTA MALANG	3,76	3,29	3,61	2,7	3,67	2,37	3,27	0,34	KPPN IKN
134	KOTA MANADO	3	2,38	3,03	2,95	2,3		2,74	-0,28	REGULER
135	KOTA MATARAM	3,92	3,38	3,42	3,37	3,53	3,4	3,47	0,26	KPPN IKN
136	KOTA MEDAN	1,56	2,04	2,85	2,76	1,98		2,37	0,6	REGULER
137	KOTA MOJOKERTO	4	3,4	3,65	3,25	3,87		3,6	0,02	REGULER
138	KOTA PADANG	3,56	2,95	3,39	2,81	3,18		3,16	0,09	REGULER
139	KOTA PADANG PANJANG	3,72	2,73	3,15	2,99	2,62		2,99	0,58	REGULER
140	KOTA PALEMBANG	2,2	2,27	3,01	3,1	2,73		2,74	-0,21	REGULER

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2024 Pada 125 Kota/Kabupaten Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Periode Tahun 2017-2022

Gambaran Umum

Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan program bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden, sebagai inisiatif dari pemerintah pusat untuk mendorong implementasi program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota.

Pada bulan Juni tahun 2024 Kementerian Komdigi telah memfasilitasi kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi *smart city* dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (*quick win*) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (*smart city*).

Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (*smart city*) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD;
3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), serta kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*).

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah yang dinilai berdasarkan *progress* serta hasil yang dicapainya. Adapun metode evaluasi yang dilakukan yakni dengan pengisian form penilaian mandiri (self-assessment) yang kemudian dikonfirmasi kevalidan data dan informasinya dengan metode wawancara oleh para praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).

Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Bobot Penilaian	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program Kota Cerdas (Smart City) (Baseline)	10%	Perencanaan	Ketersediaan dokumen legal perencanaan Kota Cerdas (Smart City)
		Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
Keluaran program Kota Cerdas (Smart City) (Output)	20%	Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Kota Cerdas (Smart City) (Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (Smart City))
		Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Keamanan Informasi	Ketersediaan kebijakan/peraturan di daerah terkait pelaksanaan keamanan informasi, dan inisiatif pemerintah daerah dalam menjadi keamanan informasi terhadap infrastruktur, dan aplikasi
Hasil program Kota Cerdas (Smart City) (Outcome)	30%	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Kota Cerdas (Smart City)	Keterlaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan program yang tertuang pada dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City)
		Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi
Dampak program Kota Cerdas (Smart City) (Impact)	20%	Hasil Survei	Pengukuran dampak implementasi program pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City) melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.
Program Quick Win	20%	Pelaksanaan	Perumusan, pelaksanaan dan keberlanjutan Quick Win
		Manajemen Risiko	Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (*road map*) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Road map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City); Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment;
- Wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Dampak pembangunan Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi;

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2024

BASELINE

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perencanaan	Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1. Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	4
	Aktivitas Dewan Smart City	2. Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	3
	Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	3. Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	3.6
Realisasi	Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	4. Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3.8
	Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	5. Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3.4
Rata-Rata			3.56

OUTPUT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Kebijakan Smart city	Ketersediaan Peraturan Smart city	6. Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang smart city sudah	4

		tersedia setelah Daerah Anda menjalani Program Gerakan Menuju 100 Smart city?	
Kelembagaan Smart city	Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	7. Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini?	3.6
	Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	8. Apakah fungsi Tim Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini?	2.8
	Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	9. Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD?	1.8
	Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	10. Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan smart city di daerah?	1.6
Anggaran Smart city	Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	11. Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?	1
	Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	12. Sejauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai implementasi smart city?	2.8
Keamanan Informasi	Ketersediaan Kebijakan Keamanan Informasi	13. Apakah tersedia kebijakan mengenai keamanan informasi? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	4
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Data dan Informasi	14. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan data dan informasi?(mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.2
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Aplikasi	15. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan seluruh aplikasi berbasis web dan mobile yang dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.2

Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Infrastruktur	16. Se jauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan infrastruktur? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	2
Rata-Rata			2.73

OUTCOME

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Program	Program Smart Governance di tahun berjalan	17. Se jauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	3.8
	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	18. Se jauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	4
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	3.2
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20. Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	3
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21. Se jauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3
	Inovasi Pelayanan Publik	22. Se jauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	3.4
	Program Smart Branding di tahun berjalan	23. Se jauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	2
	Kemudahan Berusaha	24. Se jauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	3
	Kemudahan Berusaha	25. Se jauh mana realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir? (data pertumbuhan realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir)	4
	Wajah Kota	26. Se jauh mana visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) telah ditetapkan dan digunakan?	3.2

Program	Program Smart Economy di tahun berjalan	27. Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	2.4
	Kesejahteraan Masyarakat	28. Sejauh mana persentase penduduk miskin? (Tahun Terakhir)	4
	Kesejahteraan Masyarakat	29. Sejauh mana IPM di daerah Anda? (tahun terakhir)	3.8
	Program Smart Living di tahun berjalan	30. Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	3.2
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	31. Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	32. Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan Imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	33. Sejauh mana cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	3.2
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	34. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan akses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	35. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	36. Sejauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan)?	4
	Program Smart Society di tahun berjalan	37. Ssejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	3.2
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	38. Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda? (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)	3.8

Program	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	39. Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda? (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)	4
	Kebencanaan	40. Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	3.8
	Kebencanaan	41. Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	4
	Kebencanaan	42. Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	3
	Program Smart Environment di tahun berjalan	43. Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	4
	Pengelolaan Sampah	44. Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	3.8
	Pengelolaan Sampah	45. Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah	1.8
Rencana Aksi	Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	46. Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	1.8
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart city	47. Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	1.8
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	48. Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	1.8
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	49. Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3
Rata-Rata			3.27

IMPACT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Smart Governance	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	50. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dapat diakses secara daring/online?	3.8
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	51. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas?	3.8
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	52. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	53. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/program?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	54. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas/mekanisme/kanal/ruang untuk memberikan masukan guna perbaikan kebijakan/layanan/program sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	55. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masukan dari masyarakat terkait kebijakan/layanan/program telah direspon sesuai standar waktu yang ditentukan?	3.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	56. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat keterbukaan informasi tentang program dan	3.6

		seluruh aktivitas pemerintah daerah?	
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	57. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang sudah terintegrasi?	3.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	58. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/akademisi/komunitas lainnya?	3.8
Smart Branding	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	59. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kota/kabupaten saya memiliki destinasi/atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung?	3.6
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	60. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan promosi destinasi/atraksi pariwisata secara daring sudah tersedia?	3.6
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	61. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan rekreasi dan fasilitas budaya dapat dipesan secara daring?	3.4
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	62. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online/daring sudah tersedia?	3.6
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan	63. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	3.6

	Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	rata nilai Pemerintah Daerah menyediakan berbagai program insentif untuk kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi?	
Smart Branding	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	64. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal sudah tersedia?	3.6
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	65. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama, dsb) dengan ciri khas daerah?	3.6
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	66. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah memiliki visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah?	3.6
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	67. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) kota/kabupaten saya telah dikenal oleh masyarakat di luar kota/kabupaten?	3.6
Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	68. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	2.8
	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	69. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	2.8

Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	70. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pemerintah daerah telah memberikan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri?	2.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	71. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online sudah tersedia?	2.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	72. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran sudah tersedia?	2.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	73. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program literasi UMKM Digital sudah tersedia?	2.8
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	74. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online sudah tersedia?	2.8
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	75. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran non-tunai (QRIS, dompet digital, dsb) sudah tersedia?	2.8
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	76. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan sudah tersedia?	2.8

Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	77. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring/online?	2.8
	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	78. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tempat tinggal saya sudah layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)?	2.6
	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	79. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	80. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	81. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi riwayat kesehatan saya dapat saya akses secara daring/online?	2.6
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	82. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	83. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai seluruh wilayah kabupaten/kota saya memiliki akses internet dan telekomunikasi yang memadai?	2.6

Smart Living	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	84. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb) sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	85. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota/kabupaten sudah tersedia?	2.4
Smart Society	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	86. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat berbagai komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang?	3.4
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	87. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb?	3.6
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	88. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis?	3.6
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	89. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan?	3.4

Smart Society	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	90. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat?	3.6
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	91. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu?	3.6
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	92. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif?	3.6
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	93. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif?	3.4
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	94. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan terselesaikan dengan cepat?	3.6
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	95. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai alat pemantauan dan pengendalian kualitas udara/air/tanah/hutan sudah tersedia?	3
	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	96. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat upaya	3.4

		pengurangan pencemaran udara/air/tanah/hutan yang dikelola secara terpadu?	
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	97. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai telah terjadi perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan?	3.4
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	98. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	99. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta telah berjalan?	2.6
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	100. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst?	2.6
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	101. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW saya telah terpenuhi dan kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW saya tidak pernah/semakin berkurang?	2.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	102. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro)?	2

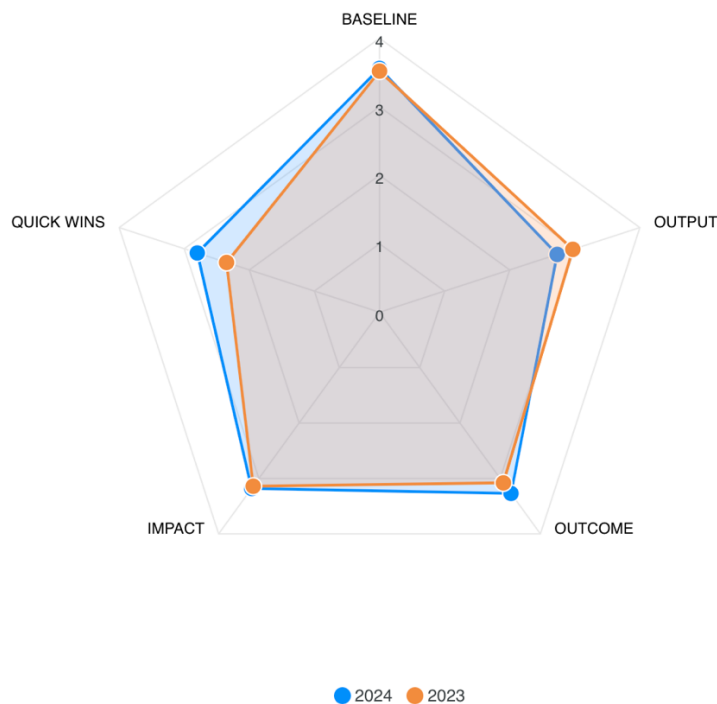
Smart Environment	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	103. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah?	2.8
Rata-Rata			3.18

QUICK WINS

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perumusan inovasi	Perumusan inovasi	104. Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	2.8
Daya tarik inovasi	Daya tarik inovasi	105. Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	3.6
Manfaat inovasi	Manfaat inovasi	106. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	3
Keunikan inovasi	Keunikan inovasi	107. Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	2.8
Peluang kemitraan	Peluang kemitraan	108. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	3.6
Potensi pengembangan	Potensi pengembangan	109. Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	3
Keberlangsungan	Keberlangsungan	110. Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	3.8
Sumber daya	Sumber daya	111. Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan	3

		menjalankan inovasi quick wins tersedia?	
Manajemen Risiko	Identifikasi risiko	112. Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	2.4
	Mitigasi risiko	113. Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	2
Keberlanjutan	Keberlanjutan	114. Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	2.6
	Keberlanjutan	115. Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	1
Rata-Rata			2.8

Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023 dan 2024



Kekuatan

1. Acuviarta, Universitas Pasundan

- Memiliki potensi SDA dan pariwisata
- Ada komitmen pimpinan untuk mengembangkan program smart city daerah
- Perekonomian berkembang pesat dan didukung daya beli masyarakat
- Infrastruktur komunikasi dan transportasi sudah lebih baik

2. Deddy Agus Susanto, Kementerian PUPR

- a. Adanya dukungan kebijakan regulasi smart city yang sudah dilegalkan dengan keputusan kepala daerah
- b. Materi Presentasi telah disusun dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan berbagai program di seluruh dimensi smart city
- c. Adanya komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan smart city
- d. Data IPM sudah cukup tinggi dan data angka kemiskinan yang cukup rendah merupakan modal yang cukup baik dalam implementasi smart city

3. Hari Kusdaryanto, Citiasia

- a. Komitmen Regulasi yang Kuat: Kabupaten Badung memiliki beberapa peraturan daerah terkait Smart City, seperti Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City dan Penyelenggaraan SPBE. Ini memberikan dasar hukum yang solid
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi yang Handal: Tersedianya jaringan internet di lebih dari 1000 titik publik, integrasi aplikasi layanan publik, dan sistem CCTV yang mendukung keamanan menjadi pondasi teknologi
- c. Program Quick Wins yang Berdampak: Inovasi seperti *Fish Go* (IoT untuk penangkapan ikan) dan Mall Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan implementasi efektif untuk melayani warga dan pelaku usaha khususnya ekosistem sektor pariwisata
- d. Keberlanjutan Pengembangan: Program quick wins terus diperluas, seperti layanan publik berbasis OSS-RBA hingga tingkat desa, menunjukkan dedikasi dalam pemerataan manfaat smart city

3. Mariam F. Barata, Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII)

- a. Yang hadir dalam evaluasi tahap II Asisten II Bidang perekonomian, Kepala Dinas Kominfo dan perwakilan dari OPD
- b. Sudah mempunyai Perbup Nomor 42 tahun 2019 tentang Master Plan Smart City 2019-2022

4. Rudi Hartanto, Universitas Gajah Mada

- a. Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City sudah ditetapkan dan sudah berjalan
- b. Beberapa program smart city tahun sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat

Kelemahan

1. Acuviarta, Universitas Pasundan

- a. Pendanaan non APBD masih relatif rendah
- b. Promosi potensi wisata dan komoditas daerah masih rendah
- c. Implementasi digitalisasi masih terbatas
- d. Sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan program/kegiatan smart city masih belum optimal

2. Deddy Agus Susanto, Kementerian PUPR

- a. Belum adanya upaya untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari program yang masih kurang optimal
- b. Kegiatan Dewan Smart City, tim pelaksana smart city dan forum smart city belum optimal
- c. Minimnya dukungan alternatif pendanaan selain APBD
- d. Minimnya kerja sama atau kolaborasi dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan implementasi smart city

3. Hari Kusdaryanto, Citiasia

- a. Ketergantungan pada Pariwisata: Pendapatan asli daerah (PAD) Badung masih sangat bergantung pada sektor pariwisata, sehingga rentan terhadap fluktuasi global seperti pandemi
- b. Kolaborasi yang Belum Maksimal: Meskipun telah melibatkan banyak pihak, partisipasi penuh dari seluruh OPD dan sektor swasta masih perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan Forum Smart City

- c. Pengelolaan Data yang Belum Optimal: Integrasi data lintas sektor belum mencapai level yang diharapkan, sehingga menghambat optimalisasi layanan berbasis Satu Data
- d. Pemanfaatan Energi Terbarukan: Implementasi energi baru terbarukan seperti panel surya masih sangat terbatas, menunjukkan peluang besar yang belum tergarap

4. **Mariam F. Barata, Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII)**

- a. Dalam menyampaikan paparan dan materi masih menggunakan Program, Rencana aksi dan inovasi yang lama
- b. Untuk program yang baru tidak mereka tampilkan karena tidak ada dalam *masterplan smart city*.
- c. Ketidaksiapan peserta dalam menjawab beberapa pertanyaan dari asesor
- d. Masih banyak hal yang belum dapat dijawab karena OPD yang bertanggungjawab tidak hadir

5. **Rudi Hartanto, Universitas Gajah Mada**

- a. Masterplan Smart City Kabupaten Badung sudah selesai tahun 2022, sedangkan penilaian mengacu pada tahun 2023
- b. Beberapa aplikasi dan program sebagian besar sudah dijalankan tahun 2019 dan tidak ada pembaruan
- c. Belum ada program Quick Wins yang baru
- d. Besarnya anggaran APBD untuk pelaksanaan program smart city masih kecil di bawah 10%
- e. Anggaran pelaksanaan program smart city yang berasal di luar APBD juga masih kecil di bawah 10%

Rekomendasi

1. **Acuviarta, Universitas Pasundan**

- a. Peningkatan promosi investasi dan komoditas daerah
- b. Peningkatan pendanaan non APBD
- c. Pengembangan smart living dan smart environment
- d. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
- e. Digitalisasi layanan publik dan transaksi ekonomi masyarakat

2. **Deddy Agus Susanto, Kementerian PUPR**

- a. Peranan Dewan Smart City, Tim Pelaksana dan forum smart city masih perlu ditingkatkan peranannya termasuk daam menunjang sosialisasi da edukasi secara luas kepada masyarakat terkait pelaksanaan program smart city
- b. Perlunya menggali alternatif pendanaan untuk membiayai pelaksanaan smart city seperti CSR, dan KPBU
- c. Perlunya meningkatkan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak terkait baik internal dan eksternal sebagai upaya penerapan smart city
- d. Perlu koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah yang lebih baik sehingga terjadi integrasi/sinergi antar program
- e. Perlu untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program-program smart city yang sudah berjalan dengan baik di mana hal ini dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan atau dewan smart city

3. **Hari Kusdaryanto, Citiasia**

- a. Diversifikasi Ekonomi Lokal: Mengembangkan sektor-sektor alternatif, seperti pertanian modern dan UMKM berbasis digital, untuk mengurangi ketergantungan pada pariwisata
- b. Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor: Mendorong partisipasi seluruh OPD dan memperkuat kemitraan dengan swasta, termasuk insentif kolaborasi dalam pengembangan Smart City
- c. Penguatan Sistem Satu Data: Membangun data center yang lebih terintegrasi dengan interoperabilitas tinggi untuk mendukung perencanaan dan monitoring
- d. Edukasi dan Literasi Digital: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital melalui pelatihan intensif berbasis komunitas

- e. Di 2025, melakukan penyesuaian Masterplan Smart City menyesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD serta kebijakan-kebijakan terkait terkini. Selanjutnya juga perlu melakukan penyegaran / penyamaan persepsi dengan anggota Dewan Smart City, Tim Pengelola, dan Forum Smart City, termasuk menyusun *quick wins*.

4. **Mariam F. Barata, Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII)**

- a. Masa berakhirnya Master Plan adalah tahun 2022, Maka perlu disusun kembali master plan yang baru
- b. Dewan Smart City dan Tim Pengelola Smart City didorong untuk kembali menyusun masterplan Smart City yang baru dengan menyesuaikan RPJMD yang baru agar sejalan
- c. Program unggulan dan inovasi yang saat ini dilakukan tahun 2023 dan 2024 dapat dijadikan sebagai program dan inovasi dalam *masterplan smart city* yang baru
- d. Dalam melakukan survey sebaiknya disesuaikan antara inovasi sub dimensi yang akan disurvei dengan respondennya. Respondennya adalah pengguna dari inovasi tersebut agar mendapatkan gambaran yang akurat dan menjadi masukan yang berharga untuk kemajuan dari inovasi tersebut
- e. Kabupaten Badung mempunyai banyak potensi wisata, budaya, kuliner dan untuk menarik wisatawan maka perlu dibuatkan branding baik logo maupun slogan yang menampilkan potensi Kab Badung

5. **Rudi Hartanto, Universitas Gajah Mada**

- a. Master plan smart city perlu segera diperbarui dan ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagai acuan dalam implementasi program smart city
- b. Perlu memberikan prioritas anggaran untuk pelaksanaan program smart city
- c. Perlu meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal dalam pengerjaan smart city serta mengupayakan pemanfaatan dana CSR dari perusahaan atau industri untuk pembiayaan program smart city di luar APBD
- d. Perlu membuat program smart city baru untuk masing-masing dimensi.